



BIRO PEREKONOMIAN

SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

RENCANA KERJA BIRO PEREKONOMIAN

TAHUN 2026

Bersinergi, Berinovasi, Berkolaborasi
untuk Ekonomi Sulawesi Tengah yang Maju dan Berkelanjutan



KOLABORATIF

Bekerja bersama untuk
mencapai tujuan
bersama



AKUNTABEL

Bertanggung jawab
dan transparan dalam
setiap kinerja



BERORIENTASI HASIL

Fokus pada capaian
nyata dan dampak
berkelanjutan



INOVATIF

Mengembangkan ide
kreatif untuk solusi
yang lebih baik



BERBASIS DATA

Mengambil keputusan
berdasarkan data
yang akurat



“Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,
berdaya saing, berkelanjutan dan berkeadilan





GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR: 000-7.2/251/Bappeda - 9.51/2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf c angka 3 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 182, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 168);
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 956);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubenrur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal ... 6 Oktober 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,


ANWAR HAFID

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2026

1. Renja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Renja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Renja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Renja Dinas Cipta Karya dan Sumberdaya Air Provinsi Sulawesi Tengah;
6. Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Renja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah;
8. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah;
9. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah;
10. Renja Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah;
11. Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah;
12. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah;
13. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah;
14. Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah;
15. Renja Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah;
16. Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah;
17. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah;
18. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah;
19. Renja Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah;
20. Renja Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
21. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah;

22. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah;
23. Renja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;
24. Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah;
25. Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah;
26. Renja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah;
27. Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah;
28. Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah;
29. Renja Sekretariat Daerah Sulawesi Tengah;
30. Renja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah;
31. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
32. Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
33. Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
34. Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
35. Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
36. Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
37. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Tengah;
38. Renja Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah;
39. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; dan
40. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Tahun 2026 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjabarkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan Biro Perekonomian, disusun dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, Indikator Kinerja Utama Tahun 2026, serta memperhatikan rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) Tahun 2025, agar perencanaan kinerja Biro Perekonomian semakin terukur, konsisten, dan akuntabel.

Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman kerja bagi seluruh aparatur Biro Perekonomian dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, materi dan komunikasi pimpinan, serta protokol, sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat kami harapkan. Semoga Rencana Kerja Tahun 2026 ini bermanfaat bagi peningkatan kinerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 17 September 2025

Kepala Biro Perekonomian

Setda Provinsi Sulawesi Tengah



Yuniarto Pasman, SH

Nip. 19720614 200312 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	6
DAFTAR ISI	7
BAB I	8
1.1 Latar Belakang.....	8
1.2 Landasan Hukum.....	8
1.3 Maksud dan Tujuan.....	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
<i>BAB I Pendahuluan</i>	10
<i>BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu</i>	10
<i>BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah</i>	10
<i>BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah</i>	10
<i>BAB V Penutup</i>	11
BAB II	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	20
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	26
BAB III	27
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	27
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	27
3.3 Program dan Kegiatan.....	32
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	39
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	40
BAB IV	41
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	41
BAB V PENUTUP	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi tahapan operasionalisasi dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029. Penyusunan Renja Tahun 2026 dimaksudkan agar target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra dapat dijabarkan secara terukur ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan tahunan, sehingga menjadi pedoman kerja bagi seluruh aparaturnya Biro Perekonomian.

Penyusunan Renja Tahun 2026 ini juga mengintegrasikan substansi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026 sebagai acuan penetapan target kinerja, serta memperhatikan rekomendasi hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) Tahun 2025 sebagai dasar penyempurnaan kualitas perencanaan kinerja, khususnya dalam penguatan cascading kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, kualitas pelaporan, dan tindak lanjut evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Dengan tersusunnya Renja Tahun 2026 ini, diharapkan pencapaian tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Renstra dapat terpantau dan terevaluasi secara berkala, sehingga apabila terjadi penyimpangan atau perkembangan baru di lingkungan strategis dapat segera dilakukan langkah koreksi dan penyesuaian.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

17. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 nomor Peraturan Gubernur belum tercantum pada dokumen Renstra sumber].

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Tahun 2026 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat sasaran, indikator kinerja, target capaian, program, kegiatan, sub kegiatan, dan pendanaan Biro Perekonomian, sebagai penjabaran operasional dari Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, Perjanjian Kinerja Tahun 2026, dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026.

Adapun tujuan penyusunan Renja Tahun 2026 adalah:

1. menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Renstra Sekretariat Daerah ke dalam rencana kerja tahunan Biro Perekonomian;
2. menjadi pedoman pelaksanaan tugas bagi seluruh aparatur Biro Perekonomian pada Tahun 2026;
3. menjadi instrumen pengukuran, pemantauan, dan evaluasi kinerja tahunan, termasuk sebagai tindak lanjut penyempurnaan atas rekomendasi LHE AKIP Tahun 2025; dan
4. menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Perjanjian Kinerja tahun berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Biro Perekonomian disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Biro Perekonomian, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Memuat Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat rincian rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu indikatif Tahun 2026 beserta prakiraan maju Tahun 2027.

BAB V Penutup

Memuat kaidah pelaksanaan dan penutup.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Biro Perekonomian Tahun 2025 dan capaian Renstra sampai dengan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut, bersumber dari rekapitulasi Bahan Renja Tahun 2026 (Tabel T-C.29). Target Renstra Tahun 2026 disandingkan dengan realisasi kumulatif sampai dengan Tahun 2025 untuk melihat tingkat capaian terhadap target akhir periode berjalan.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Biro Perekonomian s.d. Tahun 2025

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Renstra 2026 (Rp)	Realisasi s.d. 2023 (Rp)	Realisasi Kumulatif s.d. 2025 (Rp)	% Capaian thd Renstra
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
		Persentase hasil pengelolaan kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD yang ditetapkan (%)	100%			
		Total Dana pihak ketiga (%)	15.83			
		Persentase hasil pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian yang ditetapkan (%)	100%			
		Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0.06			
		Nilai Transaksi Saham Perkapita Per Provinsi (Rupiah) (Nilai)	4.336.487			
		Total Kredit/PDRB (%)	16.33			
		Aset perbankan Syariah/PDRB	1.01			
		Indeks Zakat Nasional (Poin)	0.52			
		Jumlah Produk Tersertifikasi Halal (Produk)	9.275			
		Persentase hasil pengelolaan kebijakan dan koordinasi	100%			

RENJA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

		perekonomian Sumber Daya Alam yang ditetapkan (%)				
4.01.06.03	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha, Pengelolaan BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi, Kebijakan Pendirian BLUD, Kebijakan Pendirian BUMD	5			
4.01.06.03.00.1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1			
4.01.06.03.00.2	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1			
4.01.06.03.00.3	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1			
4.01.06.03.00.4	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1			
4.01.06.03.00.5	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	1			
4.01.06.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi	Jumlah Total Dana pihak ketiga	1			

RENJA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

	Perekonomian					
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Mikro,Makro dan TPKAD	1			
		Jumlah Dokumen Data Aset Dana Pensiun/PDRB	1			
		Jumlah Data Nilai Transaksi Saham Perkapita Per Provinsi	1			
		Jumlah Data Total Kredit/PDRB	1			
		Jumlah Dokumen Data Aset perbankan Syariah/PDRB	1			
		Jumlah Dokumen Data Indeks Zakat Nasional	1			
		Jumlah Dokumen Data Produk Tersertifikasi Halal	1			
4.01.06.01.00.1	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	1			
		Jumlah Dokumen Data Aset Dana Pensiun/PDRB	1			
		Jumlah Dokumen Data Produk Tersertifikasi Halal	1			
		Jumlah Dokumen Data Indeks Zakat Nasional	1			
		Jumlah Dokumen Data Aset perbankan Syariah	1			
4.01.06.01.00.2	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1			
4.01.06.01.00.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	3			

RENJA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

	Keuangan Daerah (TPAKD)					
		Jumlah Dokumen Data Total Dana pihak ketiga	1			
		Jumlah Dokumen Data Total Kredit/PDRB	1			
		Jumlah Dokumen Data Nilai Transaksi Saham perkapita	1			
4.01.06.02	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup dan Energi dan Air	3			
4.01.06.02.00.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1			
4.01.06.02.00.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1			
4.01.06.02.00.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1			
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat	87			

RENJA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

	DAERAH PROVINSI					
4.01.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2			
4.01.01.1.05 .0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2			
4.01.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan umum	1			
4.01.01.1.06 .0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1			
4.01.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1			
4.01.01.1.08 .0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1			

Catatan: sel bertanda [DATA BELUM TERSEDIA] merupakan baris yang pada sumber Bahan Renja 2026 memuat nilai #VALUE!/rumus tidak konsisten sehingga tidak dapat disajikan tanpa asumsi. Persentase capaian dihitung kumulatif tiga tahun (2023-2025) terhadap target tahun akhir (2026) Renstra, sehingga pada sejumlah sub kegiatan nilainya dapat melebihi 100%. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan (4.01.08) tidak lagi dianggarkan pada Tahun 2026 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.1.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Biro Perekonomian dilakukan dengan membandingkan target Renstra Tahun 2024-2027 terhadap realisasi dan proyeksi capaian sebagaimana tercantum pada Bahan Renja Tahun 2026. Data Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) per indikator sub kegiatan pada tabel sumber tidak terisi sehingga ditandai.

Tabel 2.2 Analisis Capaian Kinerja Pelayanan terhadap Target Renstra Tahun 2024-2027

Indikator	Target 2024 (Rp)	Target 2025 (Rp)	Target 2026 (Rp)	Target 2027 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Proyeksi 2026 (Rp)	Proyeksi 2027 (Rp)
Persentase hasil pengelolaan kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD yang ditetapkan (%)			100%					
Total Dana pihak ketiga (%)			15.83					
Persentase hasil pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian yang ditetapkan (%)			100%					
Aset Dana Pensiun/PDRB (%)			0.06					
Nilai Transaksi Saham Perkapita Per Provinsi (Rupiah) (Nilai)			4.336.487					
Total Kredit/PDRB (%)			16.33					
Aset perbankan Syariah/PDRB			1.01					
Indeks Zakat Nasional (Poin)			0.52					
Jumlah Produk Tersertifikasi Halal (Produk)			9.275					
Persentase hasil pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian Sumber Daya Alam yang ditetapkan (%)			100%					
Persentase hasil pengelolaan kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD yang ditetapkan (%)			5					
Total Dana pihak ketiga (%)			1					
Indikator	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Proyeksi 2026	Proyeksi 2027

RENJA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha, Pengelolaan BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi, Kebijakan Pendirian BLUD, Kebijakan Pendirian BUMD			1					
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha			1					
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi			1					
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD			1					
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah			1					
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD			1					
Jumlah Total Dana pihak ketiga			1					
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Mikro, Makro dan TPKAD			3					
Jumlah Dokumen Data Aset Dana Pensiun/PDRB			1					
Jumlah Data Nilai Transaksi Saham Perkapita Per Provinsi			1					
Jumlah Data Total Kredit/PDRB			1					
Jumlah Dokumen Data Aset perbankan Syariah/PDRB			1					
Jumlah Dokumen Data Indeks Zakat Nasional			1					

RENJA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

Jumlah Dokumen Data Produk Tersertifikasi Halal			1					
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro			1					
Jumlah Dokumen Data Aset Dana Pensiun/PDRB			1					
Jumlah Dokumen Data Produk Tersertifikasi Halal			1					
Jumlah Dokumen Data Indeks Zakat Nasional			1					
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro			1					
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD			1					
Jumlah Dokumen Data Total Dana pihak ketiga			1					
Jumlah Dokumen Data Total Kredit/PDRB			1					
Jumlah Dokumen Data Nilai Transaksi Saham perkapita			1					
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup dan Energi dan Air			3					
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan			1					
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup			1					
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air			1					
Indeks Kepuasan Masyarakat			8					
			7					

RENJA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			2					
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			2					
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan umum			1					
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1					
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1					
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1					

Kolom SPM/Standar Nasional dan IKM per-indikator: [DATA BELUM TERSEDIA] pada dokumen sumber. Proyeksi Tahun 2027 pada sejumlah baris bernilai 0 sebagaimana tercantum pada Bahan Renja 2026 dan memerlukan konfirmasi lebih lanjut pada saat penyusunan Renja Tahun 2027.

Berdasarkan LHE AKIP Tahun 2025, nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Perekonomian adalah nilai sebesar 63,70 dengan predikat B (Baik), menurun dari pada Tahun 2024. Rincian nilai per komponen adalah sebagai berikut.

Komponen	Bobot	Nilai 2024	Nilai 2025
Perencanaan kinerja	30.00	25.20	19.50
Pengukuran kinerja	30.00	22.50	18.00
Laporan kinerja	15.00	10.95	7.95
Evaluasi akuntabilitas kinerja internal	25.00	19.50	18.25

Penurunan nilai AKIP terutama disebabkan oleh: (1) dokumen perencanaan belum sepenuhnya menggambarkan hubungan cascading kinerja yang berkesinambungan pada setiap level jabatan; (2) pemantauan capaian kinerja secara berjenjang belum dilaksanakan secara optimal dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengumpulan data kinerja masih terbatas; (3) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) belum sepenuhnya memenuhi prinsip dan karakteristik laporan yang baik serta belum optimal dalam menyajikan analisis efisiensi; dan (4) dari 20 rekomendasi LHE AKIP Tahun 2024, sebanyak 5 (lima) rekomendasi atau 20% belum ditindaklanjuti. Uraian lengkap dan tindak lanjut rekomendasi disajikan pada Sub-bab 2.3 dan Sub-bab 3.5.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi Renja Tahun 2025, telaahan Renstra 2025-2029, dan LHE AKIP Tahun 2025, teridentifikasi isu-isu penting sebagai berikut:

RENJA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

1. Belum optimalnya cascading kinerja secara berjenjang mulai dari tujuan, sasaran strategis, sasaran unit kerja, indikator kinerja, hingga Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), sebagaimana catatan Komponen Perencanaan Kinerja LHE AKIP Tahun 2025.
2. Pemantauan dan revidu capaian kinerja secara berjenjang (pelaksana, pejabat pengawas, pejabat administrator, hingga Kepala Perangkat Daerah) belum dilaksanakan secara rutin melalui forum monitoring dan evaluasi berkala.
3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kinerja belum optimal sehingga proses pengukuran kinerja belum sepenuhnya efisien, akurat, dan mudah ditelusuri (traceable).
4. Kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) perlu disempurnakan agar memenuhi prinsip konsistensi, keandalan, dan agregasi informasi, termasuk penyajian analisis efisiensi penggunaan anggaran dan SDM.
5. Tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya perlu dipercepat, mengingat masih terdapat 5 (lima) dari 20 rekomendasi Tahun 2024 yang belum ditindaklanjuti.

6. Kondisi kendaraan operasional dan peralatan peliputan pimpinan yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pelayanan pimpinan (Renstra Sekretariat Daerah 2025-2029).
7. Realisasi kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara serta Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah masih berada di bawah 50% terhadap target akhir Renstra sehingga memerlukan percepatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan target dan pagu indikatif pada rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan Biro Perekonomian, sebagaimana Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Rancangan Awal RKPD	Pagu Indikatif Awal (Rp)	Target Hasil Analisis Kebutuhan	Pagu Hasil Analisis (Rp)
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			1.575.000.000		
	Persentase hasil pengelolaan kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD yang ditetapkan (%)	100%			
	Total Dana pihak ketiga (%)	15.83			
	Persentase hasil pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian yang ditetapkan (%)	100%			
	Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0.06			
	Nilai Transaksi Saham Perkapita Per Provinsi (Rupiah) (Nilai)	4.336.487			
	Total Kredit/PDRB (%)	16.33			
	Aset perbankan Syariah/PDRB	1.01			
	Indeks Zakat Nasional (Poin)	0.52			
	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal (Produk)	9.275			
	Persentase hasil pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian Sumber	100%			

RENJA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

	Daya Alam yang ditetapkan (%)				
Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha, Pengelolaan BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi, Kebijakan Pendirian BLUD, Kebijakan Pendirian BUMD	5	525.000.000		
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1	105.000.000		
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1	105.000.000		
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Rancangan Awal RKPD	Pagu Indikatif Awal (Rp)	Target Hasil Analisis Kebutuhan	Pagu Hasil Analisis (Rp)
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1	105.000.000		
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1	105.000.000		
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	1	105.000.000		
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah Total Dana pihak ketiga	1	525.000.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Mikro, Makro dan TPKAD	1			
	Jumlah Dokumen Data Aset Dana	1			

RENJA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

	Pensiun/PDRB				
	Jumlah Data Nilai Transaksi Saham Perkapita Per Provinsi	1			
	Jumlah Data Total Kredit/PDRB	1			
	Jumlah Dokumen Data Aset perbankan Syariah/PDRB	1			
	Jumlah Dokumen Data Indeks Zakat Nasional	1			
	Jumlah Dokumen Data Produk Tersertifikasi Halal	1			
Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	1	175.000.000		
	Jumlah Dokumen Data Aset Dana Pensiun/PDRB	1			
	Jumlah Dokumen Data Produk Tersertifikasi Halal	1			
	Jumlah Dokumen Data Indeks Zakat Nasional	1			
	Jumlah Dokumen Data Aset perbankan Syariah	1			
Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1	175.000.000		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	3	175.000.000		
	Jumlah Dokumen Data Total Dana pihak ketiga	1			
	Jumlah Dokumen Data Total Kredit/PDRB	1			
	Jumlah Dokumen Data Nilai Transaksi Saham perkapita	1			

RENJA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup dan Energi dan Air	3	525.000.000		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1	175.000.000		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1	175.000.000		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1	175.000.000		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	925.000.000		
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	50.000.000		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	50.000.000		
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan umum	1	250.000.000		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	250.000.000	82.728.000	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	625.000.000		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	625.000.000	355.772.783	

Selisih antara pagu rancangan awal RKPD dan pagu hasil analisis kebutuhan pada sejumlah sub kegiatan (contohnya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD serta Penyiapan Materi Pimpinan) menunjukkan adanya penyesuaian kebutuhan riil pelaksanaan tugas Biro Perekonomian Tahun 2026 dibandingkan usulan awal.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dokumen usulan program dan kegiatan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)/pokok pikiran DPRD/aspirasi masyarakat untuk lingkup tugas dan fungsi Biro Perekonomian tidak termasuk dalam 6 (enam) dokumen sumber yang disediakan untuk penyusunan Renja ini. Mengingat karakteristik tugas dan fungsi Biro Perekonomian yang bersifat pelayanan internal kepada Pimpinan Sekretariat Daerah, usulan program/kegiatan dari masyarakat pada umumnya tidak secara langsung diarahkan kepada Biro Perekonomian. Apabila terdapat dokumen usulan dimaksud, sub-bab ini agar dilengkapi pada proses finalisasi Renja.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dokumen kebijakan nasional (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Renstra Kementerian atau Lembaga terkait tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi) tidak termasuk dalam dokumen sumber yang disediakan. Telaahan kebijakan yang dapat disajikan dalam Renja ini terbatas pada keselarasan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu Misi Kedua: "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih, Inovatif, Kolaboratif serta Keamanan Daerah yang Tangguh Berlandaskan Nilai Religius dan Kearifan Lokal", dengan Tujuan "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis, Bersih, Inovatif dan Kolaboratif" dan Sasaran "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas", yang diukur antara lain melalui Indeks Reformasi Birokrasi General dan Indeks Pelayanan Publik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renja Biro Perekonomian Tahun 2026 disusun secara berjenjang (cascading) mengacu pada Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029, Perjanjian Kinerja Tahun 2026, Indikator Kinerja Utama Tahun 2026, dan Diagram Arsitektur Kinerja Biro Perekonomian, dengan struktur sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis RPJMD (Ultimate Outcome): terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas, dengan indikator Indeks Pelayanan Publik, diampu oleh Gubernur Sulawesi Tengah.
2. Sasaran Strategis Renstra Perangkat Daerah (Intermediate Outcome): terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas, dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi General, diampu oleh Kepala Sekretariat Daerah.
3. Sasaran Program (Intermediate Outcome): layanan Biro Perekonomian berkualitas, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, diampu oleh Kepala Biro Perekonomian.

Target IKM Biro Perekonomian Tahun 2026 ditetapkan sebesar 82 (delapan puluh dua) sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 yang ditandatangani tanggal 27 Februari 2026. Nilai ini berbeda dengan proyeksi pada Bahan Renja 2026/Renstra yang mencantumkan target 83 pada Tahun 2026 (lihat catatan pada Lampiran Catatan Penyusunan). Sesuai arahan penyusunan, target 82 pada Perjanjian Kinerja dan IKU digunakan sebagai acuan resmi Renja ini karena merupakan dokumen penetapan kinerja yang paling mutakhir.

Sasaran Program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan pada 3 (tiga) Bagian di lingkup Biro Perekonomian, dan diteruskan ke Sasaran Sub Kegiatan pada masing-masing Sub Bagian, sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2026 berikut.

Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kegiatan	Target 2026	
1. Tersedianya dokumen data total dana pihak ketiga 2. Tersedianya dokumen data kebijakan makro, mikro, dan TPAKD 3. Tersedianya dokumen data Aset Dana Pensiun/ PDRB 4. Tersedianya dokumen data Nilai Transaksi saham per kapita per provinsi (rupiah) (Nilai) 5. Tersedianya Dokumen data Total Kredit/PDRB 6. Tersedianya Dokumen data Aset Perbankan Syariah/PDRB 7. Tersedianya Dokumen Data Zakat Daerah 8. Tersedianya Dokumen data data Produk bersertifikasi Halal 9. Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah 10. Nilai hasil Survey Implementasi ASN BerAKHLAK 11. Meningkatnya kualitas perencanaan, Pengukuran, evaluasi & pelaporan kinerja 12. Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan (TLHP) 13. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen data Total dana pihak ketiga 2. Jumlah Dokumen hasil pengelolaan kebijakan Mikro, Makro dan TPKAD 3. Jumlah Data Aset Dana Pensiun/PDRB 4. Jumlah Dokumen data Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah) (Nilai) 5. Jumlah Dokumen data Total Kredit/PDRB 6. Jumlah Dokumen data Aset Perbankan Syariah/PDRB 7. Jumlah Dokumen Zakat Daerah (IZD) 8. Jumlah Dokumen data Produk bersertifikasi Halal 9. Laporan Rekapitulasi Indeks Profesional ASN pada Aplikasi SIAP Sulteng/ My SAPK masing-masing perangkat daerah 10. Berita acara hasil survey berakhlak asn 11. Nilai Sakip Perangkat Daerah 12. Persentase capaian IKU Perangkat Daerah 13. Nilai Kematangan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah 14. Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah 15. Persentase Hasil Tindaklanjuti Rekomendasi (TLHP) BPK dan APIP 16. Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah 17. Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi. 1. Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD, pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha, Pengelolaan BLUD dan Kebijakan pendirian BLUD. 1. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Sumber daya Alam, Pertambangan, Lingkungan Hidup, Pertanian, Perikanan, energi dan air	1. 1 Dokumen 2. 1 Dokumen 3. 1 Dokumen 4. 1 Dokumen 5. 1 Dokumen 6. 1 Dokumen 7. 1 Dokumen 8. 1 Dokumen 9. 1 Laporan 10. 1 Laporan 11. 83,80 12. 100 % 13. 2 Data 14. 100 % 15. 1 Dokumen 16. 1 Dokumen 17. 1 Dokumen 1. 5 Dokumen	2.

			1. 3 Dokumen	
Sub Bagian	Sasaran Sub Kegiatan (Output)	Indikator Sub Kegiatan	Target 2026	
Tata Usaha	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	
	Tersusunnya dokumen perencanaan PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (terdiri dari RKA, RKA-P, DPA, DPA-P, Renstra, RKPD, RKPD-P, Renja, Perjanjian Kinerja, , Dokumen Manajemen Resiko, dan Dokumen Proses Bisnis PD).	11 Dokumen	
	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja PD (terdiri dari: Laporan Capaian Kinerja, Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, LKIP dan, LPPD)	4 Dokumen	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
Analisi Ekonomi Mikro	Tersusunnya Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1 Dokumen	
	Tersusunnya dokumen data Nilai Transaksi saham per kapita per provinsi (rupiah) (Nilai)	Jumlah dokumen data Nilai Transaksi saham per kapita per provinsi (rupiah) (Nilai)	1 Dokumen	

RENJA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

	Tersusunnya dokumen data Total Kredit/PDRB	Jumlah dokumen data Total Kredit/PDRB	1 Dokumen	
	Tersusunnya Total Dana pihak ketiga	Jumlah Total Dana pihak ketiga	1 Dokumen	
Analisis Ekonomi Makro	Tersusunnya Aset Perbankan Syariah/PDRB	Jumlah Aset Perbankan Syariah/PDRB	1 Dokumen	
	Tersusun Data Aset Dana Pensiun/PDRB.	Jumlah Data Aset Dana Pensiun/PDRB	1 Dokumen	
	Tersusunnya Dokumen Produk Bersertifikat halal	Jumlah Produk Bersertifikat halal	1 Dokumen	
	Tersedianya Dokumen Data Zakat Daerah	Jumlah Zakat Daerah (IZD)	1 Dokumen	
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)	Tersusunnya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Dokumen	
	Tersusunnya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	1 Dokumen	
BADAN USAHA MILIK DAERAH AIR MINUM,LIMBAH DAN SANITASI	Tersusunnya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dokumen	

RENJA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

BADAN USAHA MILIK DAERAH JASA KEUANGAN	Tersusunnya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1 Dokumen	
	Tersusunnya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	
SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersusunnya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	
SUMBER DAYA ALAM ENERGI DAN AIR	Tersusunnya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi kebijakan Sumber Daya energi dan Ai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1 Dokumen	
SUMBER DAYA ALAM PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	Tersusunnya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1 Dokumen	

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan Biro Perekonomian Tahun 2026 beserta prakiraan maju Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut, bersumber dari Bahan Renja Tahun 2026.

Tabel 3.3 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Lokasi	Targ et 202	Satuan	Pagu 2026 (Rp)	Targ et 2027	Satua n	Pagu 2027 (Rp)*
------	-------------------------------	-----------	--------	-------------	--------	----------------	--------------	---------	-----------------

RENJA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

				6			*		
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Sulawesi Tengah			1.575.000.000			
		Persentase hasil pengelolaan kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD yang ditetapkan (%)	Sulawesi Tengah	100%	Persen				
		Total Dana pihak ketiga (%)	Sulawesi Tengah	15.83	Persen				
		Persentase hasil pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian yang ditetapkan (%)	Sulawesi Tengah	100%	Persen				
		Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	Sulawesi Tengah	0.06	Persen				
		Nilai Transaksi Saham Perkapita Per Provinsi (Rupiah) (Nilai)	Sulawesi Tengah	4.336.487	Rupiah				
		Total Kredit/PDRB (%)	Sulawesi Tengah	16.33	Persen				
		Aset perbankan Syariah/PDRB	Sulawesi Tengah	1.01	C				
		Indeks Zakat Nasional (Poin)	Sulawesi	0.52	Poin				

RENJA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

			Tengah						
		Jumlah Produk Tersertifikasi Halal (Produk)	Sulawesi Tengah	9.275	Produk				
		Persentase hasil pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian Sumber Daya Alam yang ditetapkan (%)	Sulawesi Tengah	100%	Persen				
4.01.06.03	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha, Pengelolaan BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi, Kebijakan Pendirian BLUD, Kebijakan Pendirian BUMD	Sulawesi Tengah	5	Dokumen	525.000.000			
4.01.06.03.000.1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Sulawesi Tengah	1	Dokumen	105.000.000			
4.01.06.03.000.2	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Sulawesi Tengah	1	Dokumen	105.000.000			
4.01.06.03.000.3	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Sulawesi Tengah	1	Dokumen	105.000.000			
4.01.06.03.000.4	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Sulawesi Tengah	1	Dokumen	105.000.000			

RENJA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

	Layanan Umum Daerah								
4.01.06.03.000.5	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Sulawesi Tengah	1	Dokumen	105.000.000			
4.01.06.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah Total Dana pihak ketiga	Sulawesi Tengah	1	Dokumen	525.000.000			
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Mikro, Makro dan TPKAD	Sulawesi Tengah	1	Dokumen				
		Jumlah Dokumen Data Aset Dana Pensiun/PDRB	Sulawesi Tengah	1	Dokumen				
		Jumlah Data Nilai Transaksi Saham Perkapita Per Provinsi	Sulawesi Tengah	1	Dokumen				
		Jumlah Data Total Kredit/PDRB	Sulawesi Tengah	1	Dokumen				
		Jumlah Dokumen Data Aset perbankan Syariah/PDRB	Sulawesi Tengah	1	Dokumen				
		Jumlah Dokumen Data Indeks Zakat Nasional	Sulawesi Tengah	1	Dokumen				

RENJA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

		Jumlah Dokumen Data Produk Tersertifikasi Halal	Sulawesi Tengah	1	Dokumen				
4.01.06.01.000.1	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Sulawesi Tengah	1	Dokumen	175.000.000			
		Jumlah Dokumen Data Aset Dana Pensiun/PDRB	Sulawesi Tengah	1	Dokumen				
		Jumlah Dokumen Data Produk Tersertifikasi Halal	Sulawesi Tengah	1	Dokumen				
		Jumlah Dokumen Data Indeks Zakat Nasional	Sulawesi Tengah	1	Dokumen				
		Jumlah Dokumen Data Aset perbankan Syariah	Sulawesi Tengah	1	Dokumen				
4.01.06.01.000.2	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Sulawesi Tengah	1	Dokumen	175.000.000			
4.01.06.01.000.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	Sulawesi Tengah	3	Dokumen	175.000.000			

RENJA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

	(TPAKD)								
		Jumlah Dokumen Data Total Dana pihak ketiga	Sulawesi Tengah	1	Dokumen				
		Jumlah Dokumen Data Total Kredit/PDRB	Sulawesi Tengah	1	Dokumen				
		Jumlah Dokumen Data Nilai Transaksi Saham perkapita	Sulawesi Tengah	1	Dokumen				
4.01.06.02	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup dan Energi dan Air	Sulawesi Tengah	3	Dokumen	525.000.000			
4.01.06.02.000.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Sulawesi Tengah	1	Dokumen	175.000.000			
4.01.06.02.000.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Sulawesi Tengah	1	Dokumen	175.000.000			
4.01.06.02.000.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Sulawesi Tengah	1	Dokumen	175.000.000			

RENJA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

	Energi dan Air		h						
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sulawesi Tengah	87	Indeks	925.000.000			
4.01.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sulawesi Tengah	2	Orang	50.000.000			
4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sulawesi Tengah	2	orang	50.000.000			
4.01.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan umum	Sulawesi Tengah	1	Laporan	250.000.000			
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sulawesi Tengah	1	Laporan	250.000.000			
4.01.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sulawesi Tengah	1	Laporan	625.000.000			
4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1	1 Laporan	625.000.000			

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Biro Perekonomian merupakan unit kerja pendukung (supporting unit) Sekretariat Daerah yang melaksanakan fungsi Biro Perekonomian mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengkoordinasian perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, dan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, dan tidak melaksanakan urusan pemerintahan yang bersifat keruangan (spesial). dengan demikian program dan kegiatan Biro Perekonomian tahun 2026 tidak memiliki keterkaitan langsung dengan rencana tata ruang wilayah (RT/RW) maupun kajian langsung hidup strategis(KLHS) Provinsi Sulawesi Tengah.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil evaluasi pada Bab II, telaahan Renstra, dan rekomendasi LHE AKIP Tahun 2025, ditetapkan isu-isu strategis yang menjadi perhatian utama Renja Tahun 2026 beserta strategi penanganannya sebagai berikut:

1. Melengkapi laporan kinerja dengan analisis capaian kinerja program dan kegiatan, sehingga tidak hanya menyajikan realisasi anggaran, tetapi juga tingkat pencapaian target, hasil yang diperoleh, dan analisis kinerja.
2. Menyajikan informasi capaian kinerja yang berfokus pada pencapaian sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Biro, sehingga kontribusi setiap program dan kegiatan terhadap sasaran strategis dapat tergambar secara jelas.
3. Menyusun analisis faktor pendukung dan faktor penghambat pencapaian kinerja sebagai dasar penyusunan langkah perbaikan dan peningkatan kinerja.
4. Menyajikan capaian Indeks Kualitas Kebijakan beserta analisis hasil pencapaiannya dalam laporan kinerja agar informasi kinerja lebih lengkap dan komprehensif.
5. Meningkatkan kualitas analisis perbaikan kinerja dengan menyusun alternatif dan solusi yang spesifik, terukur, implementatif, serta berbasis pada analisis akar permasalahan (*root cause analysis*) atas setiap hambatan pencapaian kinerja.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana kerja dan pendanaan Biro Perekonomian Tahun 2026 disusun berdasarkan Bahan Renja Tahun 2026, menggambarkan tren target dan pagu indikatif sejak Kondisi Awal RPJMD (2021) sampai dengan Tahun 2026, guna memberikan gambaran konsistensi perencanaan penganggaran dari tahun ke tahun.

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Biro Perekonomian Tahun 2026

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal RPJMD 2021 (Rp)	Targe t 2024	Sat.	Pagu 2024 (Rp)	Targ e t 2025	Sat.	Pagu 2025 (Rp)	Tar ge t 2026	Sat.	Pagu 2026 (Rp)	Lokasi
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN											1.575.000.000	Sulaw esi Tenga h
		Persentase hasil pengelolaan kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD yang ditetapkan (%)								100%	Perse n		Sulaw esi Tenga h
		Total Dana pihak ketiga (%)								15.83	Perse n		Sulaw esi Tenga h
		Persentase hasil pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian yang ditetapkan (%)								100%	Perse n		Sulaw esi Tenga h
		Aset Dana Pensiun/PDRB (%)								0.06	Perse n		Sulaw esi Tenga

RENJA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

													h
		Nilai Transaksi Saham Perkapita Per Provinsi (Rupiah) (Nilai)								4.336.487	Rupiah		Sulawesi Tengah
		Total Kredit/PDRB (%)								16.33	Persen		Sulawesi Tengah
		Aset perbankan Syariah/PDRB								1.01	C		Sulawesi Tengah
		Indeks Zakat Nasional (Poin)								0.52	Poin		Sulawesi Tengah
		Jumlah Produk Tersertifikasi Halal (Produk)								9.275	Produk		Sulawesi Tengah
		Persentase hasil pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian Sumber Daya Alam yang ditetapkan (%)								100%	Persen		Sulawesi Tengah
4.01.06.03	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha.								5	Dokumen	525.000.000	Sulawesi Tengah

RENJA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

		Pengelolaan BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi, Kebijakan Pendirian BLUD, Kebijakan Pendirian BUMD											
4.01.06.03.000.1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha								1	Dokumen	105.000.000	Sulawesi Tengah
4.01.06.03.000.2	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi								1	Dokumen	105.000.000	Sulawesi Tengah
4.01.06.03.000.3	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD								1	Dokumen	105.000.000	Sulawesi Tengah
4.01.06.03.000.4	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah								1	Dokumen	105.000.000	Sulawesi Tengah

RENJA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

	Badan Layanan Umum Daerah											
4.01.06.03.000.5	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD							1	Dokumen	105.000.000	Sulawesi Tengah
4.01.06.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah Total Dana pihak ketiga							1	Dokumen	525.000.000	Sulawesi Tengah
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Mikro, Makro dan TPKAD							1	Dokumen		Sulawesi Tengah
		Jumlah Dokumen Data Aset Dana Pensiun/PDRB							1	Dokumen		Sulawesi Tengah
		Jumlah Data Nilai Transaksi Saham Perkapita Per Provinsi							1	Dokumen		Sulawesi Tengah
		Jumlah Data Total Kredit/PDRB							1	Dokumen		Sulawesi Tengah
		Jumlah Dokumen Data Aset perbankan Syariah/PDRB							1	Dokumen		Sulawesi Tengah

RENJA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

													h
		Jumlah Dokumen Data Indeks Zakat Nasional								1	Doku men		Sulaw esi Tenga h
		Jumlah Dokumen Data Produk Tersertifikasi Halal								1	Doku men		Sulaw esi Tenga h
4.01.06. 01.000. 1	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro								1	Doku men	175.000.000	Sulaw esi Tenga h
		Jumlah Dokumen Data Aset Dana Pensiun/PDRB								1	Doku men		Sulaw esi Tenga h
		Jumlah Dokumen Data Produk Tersertifikasi Halal								1	Doku men		Sulaw esi Tenga h
		Jumlah Dokumen Data Indeks Zakat Nasional								1	Doku men		Sulaw esi Tenga h
		Jumlah Dokumen Data Aset perbankan Syariah								1	Doku men		Sulaw esi Tenga h
4.01.06. 01.000. 2	Fasilitasi Pengelolan Kebijakan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro								1	Doku men	175.000.000	Sulaw esi Tenga h

RENJA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

	Mikro												
4.01.06.01.000.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD								3	Dokumen	175.000.000	Sulawesi Tengah
		Jumlah Dokumen Data Total Dana pihak ketiga								1	Dokumen		Sulawesi Tengah
		Jumlah Dokumen Data Total Kredit/PDRB								1	Dokumen		Sulawesi Tengah
		Jumlah Dokumen Data Nilai Transaksi Saham perkapita								1	Dokumen		Sulawesi Tengah
4.01.06.02	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan								3	Dokumen	525.000.000	Sulawesi Tengah

RENJA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

	Koordinasi Sumber Daya Alam	Perikanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup dan Energi dan Air											
4.01.06.02.000.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan								1	Dokumen	175.000.000	Sulawesi Tengah
4.01.06.02.000.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup								1	Dokumen	175.000.000	Sulawesi Tengah
4.01.06.02.000.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air								1	Dokumen	175.000.000	Sulawesi Tengah

RENJA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

	n Energi dan Air												
4.01.01	PROGR AM PENUN JANG URUSA N PEMERI NTAHA N DAERA H PROVIN SI	Indeks Kepuasan Masyarakat								87	Indeks	925.000.000	Sulaw esi Tenga h
4.01.01. 1.05	Kegiata n Administ rasi Kepega waian Perangk at Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								2	Orang	50.000.000	Sulaw esi Tenga h
4.01.01. 1.05.00 11	Bimbing an Teknis Impleme ntasi Peratura n Perunda ng- Undang an	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								2	orang	50.000.000	Sulaw esi Tenga h
4.01.01. 1.06	Kegiata n Administ rasi	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan umum								1	Lapora n	250.000.000	Sulaw esi Tenga

RENJA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

	Umum Perangkat Daerah												h
4.01.01.1.06.00.09	Penyele nggaraan Rapat Koordin asi dan Konsulta si SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								1	Lapora n	250.000.000	Sulaw esi Tenga h
4.01.01.1.08	Kegiata n Penyedi aan Jasa Penunja ng Urusan Pemerin tahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								1	Lapora n	625.000.000	Sulaw esi Tenga h
4.01.01.1.08.00.03	Penyedi aan Jasa Peralata n dan Perle ng kapa n Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								1	1 Lapora n	625.000.000	

Total pagu indikatif Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Tahun 2026 adalah sebesar Rp 1.575.000.000, bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Tengah. Angka ini digunakan sebagai acuan utama pendanaan Renja Tahun 2026 sesuai dengan Bahan Renja 2026 yang ditetapkan sebagai sumber utama seluruh tabel dalam dokumen ini. Nilai tersebut berbeda dengan pagu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026 tingkat Biro (Rp438.500.783) maupun penjumlahan pagu Perjanjian Kinerja tingkat Bagian ($\pm$ Rp 0.); perbedaan ini dijelaskan pada Lampiran Catatan Penyusunan dan direkomendasikan untuk diverifikasi lebih lanjut oleh Bagian Perencanaan dan Kepegawaian bersama Bagian Keuangan.

Rincian sasaran, indikator, dan target kinerja pada level kegiatan dan sub kegiatan mengikuti struktur cascading Perjanjian Kinerja Tahun 2026

RENJA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

sebagaimana telah diuraikan pada Sub-bab 3.2, sedangkan besaran pagu mengikuti Tabel 3.3 dan Tabel 4.1 di atas.

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 disusun sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, dengan mengintegrasikan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, Indikator Kinerja Utama Tahun 2026, Bahan Renja Tahun 2026, serta rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) Tahun 2025.

Dokumen ini menjadi acuan bagi seluruh aparatur Biro Perekonomian dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2026, sekaligus menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja secara berjenjang. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini sangat ditentukan oleh komitmen bersama seluruh pejabat dan pegawai lingkup Biro Perekonomian, koordinasi yang baik antar Bagian dan Sub Bagian, serta konsistensi pemantauan capaian kinerja sebagaimana arahan tindak lanjut LHE AKIP Tahun 2025.

Kaidah pelaksanaan Renja Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Renja Tahun 2026 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Perekonomian Tahun 2026;
2. setiap Bagian dan Sub Bagian bertanggung jawab melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai target dan pagu yang telah ditetapkan, serta melaporkan capaian kinerja secara berkala;
3. Kepala Biro Perekonomian melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Renja secara berjenjang dan berkala sebagai tindak lanjut rekomendasi LHE AKIP Tahun 2025;
4. apabila terjadi perubahan kebijakan atau perkembangan strategis yang memengaruhi target kinerja, dapat dilakukan penyesuaian melalui mekanisme perubahan Renja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Demikian Rencana Kerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 disusun untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

